

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara/pemerintah, termasuk yang diantaranya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelayanan publik secara umum masih rendah kualitasnya, banyak masalah yang mengakibatkan terjadinya ketidakpuasan atas pelayanan publik di masyarakat secara luas. Masalah yang umum terjadi adalah *Maladministrasi* seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga mutlak diperlukan reformasi birokrasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan demi terwujudnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Maka dari itu, dibentuk lah kantor Ombudsman Republik Indonesia sebagai Lembaga pengawas dan sekaligus menangani pengaduan pelayanan publik yang sesuai yg harus mengaju pada peraturan kementerian, yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, pada bab III pasal 6 ruang kantor disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan peraturan dari kementerian.

Fenomena yang ditemukan pada kantor Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan hasil survei yang dilakukan adalah Kondisi Ruang eksisting pada kantor Ombudsman Republik Indonesia yang terkesan kaku, tidak hangat, dan terkesan tidak humanis yang berdampak pada tamu yang datang ke kantor Ombudsman Republik Indonesia yang membuat segan dan tidak nyaman. Pada

interior seperti Kebutuhan Ruang yang belum optimal salah satunya belum tersedianya fasilitas utama dikarenakan belum sesuai standar ketentuan dari kementerian, Sehingga berdampak pada ketidak puasan tamu dan berdampak pada kesan kantor yang terkesan tidak humanis. Ukuran Ruang yang tidak sesuai standar dari kementerian, sehingga berdampak pada produktifitas kerja staf yang tidak optimal.

Ketentuan Ruang yang belum sesuai standar ketentuan dari kementerian sehingga menyebabkan hasil kerja yang tidak optimal, Terlihat pada ruang pelayanan pengaduan Keadaan ruang yang kurang luas meningkatkan tingkat tidak nyamannya pada penerima laporan dan tamu pelapor dengan keadaan ruang yang kurang baik sehingga mempersulit aktifitas kerja baik bagi staf mau pun tamu kantor Ombudsman Republik Indonesia, Sehingga berdampak pada hasil kerja yang tidak optimal. Pengkondisian ruang, Sistem keamanan pada ruang pelayanan kantor Ombudsman Republik Indonesia masih kurang baik terlihat pada penggunaan partisi tertutup sehingga kurangnya tingkat keamanan pada mobilitas kerja serta berpengaruh pada psikologi seperti adanya rasa tertekan pada si penerima laporan ketika menerima tamu pelapor yang emosional.

Maka dari hasil data yang di dapat permasalahan yang di temui pada Kantor Ombudsman Republik Indonesia. Maka hasil akhir yang ingi diciptakan pada perancangan Kantor Ombudsman Republik Indonesia adalah diharapkan dapat terciptanya membuat pengunjung tamu yang akan mengajukan pengaduannya pada Kantor Ombudsman Republik Indonesia merasa rilex dan nyaman.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dapat ditemukan di Kantor Ombudsman Republik Indonesia kota Jakarta Selatan, iyalah:

- a. Kebutuhan Ruang, yang belum optimal sesuai standar ketentuan dari kementerian (kementerian pemerintah no 48 tahun 2013 pasal 8). Sehingga menyebabkan hasil kerja yang tidak optimal.

- b. Ukuran Ruang, yang tidak sesuai standar dari kementerian, sehingga berdampak pada produktifitas kerja staf yang tidak optimal.
- c. Kondisi Ruang, yang terkesan tidak hangat, kaku, dan terkesan tidak humanis. Sehingga pada tamu yang datang ke kantor Ombudsman Republik Indonesia yang membuat segan dan tidak nyaman. Dan berdampak pada produktifitas kerja staf yang tidak optimal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah :

- a. Bagaimana merancang Kantor Ombudsman Republik Indonesia kota Jakarta Selatan yang ideal secara kebutuhan ruang ?
- b. Bagaimana merancang ukuran ruang Kantor Ombudsman Republik Indonesia kota Jakarta Selatan yang sesuai standar dari kementerian ?
- c. Bagaimana merancang kondisi ruang pada Kantor Ombudsman Republik Indonesia kota Jakarta Selatan yang humanis, hangat, bersih dan terpercaya ?

1.4 Tujuan dan Sasaran Perancangan

Tujuan dan Sasaran perancangan dari redesain Kantor Ombudsman Republik Indonesia kota Jakarta Selatan sebagai berikut :

- a. Menambah ruang (Ruang Laktasi, Koperasi) yang belum ada, sesuai dengan standar pemerintah.
- b. Merancang Ukuran Ruang yang sesuai standar dari kementerian.
- c. Merancang Kondisi Ruang yang humanis, hangat, bersih dan terpercaya.

1.5 Batasan Perancangan

Objek perancangan interior iyalah Kantor Ombudsman Republik Indonesia kota Jakarta, adapun batasan batasan perancangan Kantor Ombudsman Republik Indonesia kota Jakarta adalah sebagai berikut :

Ruang Lingkup dan batasan Perancangan Kantor Ombudsman Republik Indonesia kota Jakarta :

a. Luasa Perancangan:

- Lantai Dasar : 895 m²
- Lantai 3 : 1.081 m²
- Lantai 4 : 1.081 m²
- Total Perancangan : 3.057 m²

b. Lokasi perancangan berada di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan, Karet Kuningan, RT.1/RW.5, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 Dengan luasan bangunan yang berukuran 9.358 m².

c. Fungsi utama kantor adalah sebagai kantor pemerintahan yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

d. Batas Lokasi:

- Utara: Jl. HR. Rasuna Said
Plaza Festifal Mall Kuningan
- Selatan: Jl. HR. Rasuna Said
Kantor Ombudsman Republik Indonesia
- Barat: Jl. Pedurenan Mesjid Raya
Direktorat Jendral Imigrasi
- Timur: Jl. R.E Marthadinata
Gran Rubina Business Park

e. Batas Perancangan :

➤ Area Publik

- Lobby Dan Receptionis
- Ruang Playanan Penerima Laporan
- Ruang Pawarta
- Ruang Tunggu
- Perpustakaan
- Ruang Rapat
- Auditorium
- Koperasi
- Ruang Meeting

➤ Area Semi Private

- Ruang Kerja Staf
- Ruang Kepala Bagian Jakarta
- Kordinator Tim
- Ruang Kepala Bagian
- Bendahara
- Ruang Arsip Laporan Masyarakat
- Ruang Kepala Bagian Hukum
- Ruang Sekjen
- Ruang Biro
- Ruang Staf.
- Call Center

➤ Area Service

- Pantry
- Mushollah
- Toilet

1.6 Metode Perancangan

Metode perancangan yang dipilih oleh desainer yaitu meliputi tahapan analisis dan sintesis sehingga pada akhirnya menghasilkan sebuah hasil akhir desain. Pada tahapan analisis, data-data yang terkumpul dianalisis sehingga dapat menghasilkan *programming*/perencanaan berdasarkan masalah-masalah yang ada dan menghasilkan sebuah hasil akhir berupa desain. Selanjutnya, pada tahapan sintesis, ide dasar yang dihasilkan akan diperdalam kembali dari segala analisa komponen. Maka dari dalam pengumpulan bahan serta data diperlukan penelitian yang terdiri dari Pengumpulan Data seperti :

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

a. Data Primer

Pengumpulan data-data yang dibutuhkan untuk perancangan kantor, dengan melakukan survey diantaranya :

- Kantor Ombudsman Republik Indonesia Kota Jakarta
- Kantor Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
- Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan

Observasi, data fisik didapatkan melalui observasi secara langsung dengan melakukan pengamatan, pencatatan dan dokumentasi terkait dengan permasalahan pada objek perancangan Kantor Ombudsman Republik Indonesia kota Jakarta. Wawancara, Melakukan interview langsung dengan user. Untuk mendapatkan gambaran mengenai, aktifitas dan fasilitas yang diperlukan dari Kantor Ombudsman Republik Indonesia kota Jakarta.

Studi Aktivitas, Mengetahui berapa banyak pengguna ruang serta aktivitas didalam ruang meliputi aktivitas mingguan atau sehari – hari kemudian dianalisa sesuai dengan kebutuhan pengguna sehingga fasilitas dapat berjalan dengan maksimal.

Studi Banding, Melakukan studi banding pada obyek yang sejenis sebagai dasar perbandingan dalam menyusun konsep perancangan yang meliputi:

- Aktifitas dan fasilitas yang tersedia maupun yang belum tersedia di Kantor Ombudsman Republik Indonesia kota Jakarta.
- Sistem sirkulasi aktifitas ruang, kebutuhan ruang, pola perilaku user.

b. Data sekunder

Data sekunder bertujuan untuk pengumpulan data pengetahuan mengenai objek redesain, meliputi :

Berupa kumpulan data yang berasal dari majalah, jurnal, buku, dan internet yang berhubungan dengan judul perancangan. Juga dilakukan guna mengumpulkan standar serta peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah terkait kantor pemerintahan. Studi literatur ini juga digunakan dalam menemukan standar operasional, Studi Banding Membandingkan dari beberapa kantor lain yang sudah digunakan di daerah ataupun wilayah lain.

c. Analisa Data

Analisa yang berkaitan dengan pengumpulan data secara primer dan sekunder guna dapat menunjang perancangan Kantor Ombudsman Republik Indonesia kota Jakarta, melalui analisa, sirkulasi, aktifitas, luasan, kondisi ruang, tata layout, furnitur, penggunaan material, dan pemilihan warna yang sesuai dengan standar interior.

d. Tema dan Konsep

Tema yang diambil adalah *Warm, Friendly and Trustworthy Service*. Tema ini diambil dari sebuah identitas dari Ombudsman Republik Indonesia itu sendiri. Tema ini mengartikan tentang

pelayanan publik yang hangat, bersih dan terpercaya. “Hangat, Ramah, Bersih dan Terpercaya” merupakan kata kunci ide pengambilan tema perancangan. Tema ini dipakai sebagai langkah awal meningkatkan kembalinya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Indonesia.

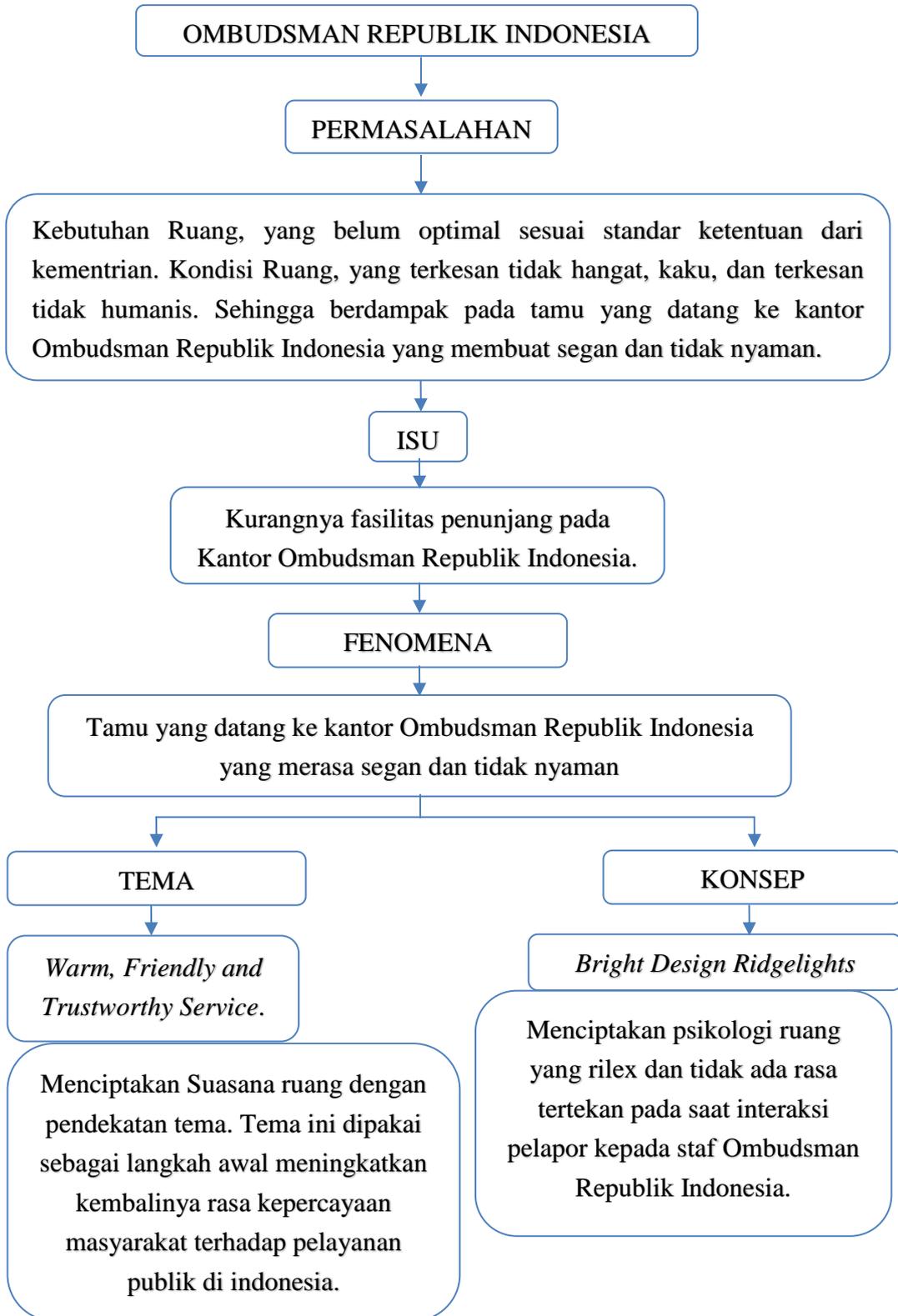
Tema akan di terapkan pada pengaplikasian konsep warna, bentuk, material, furnitur, dll. Dengan harapan Tema ini dapat menjawab fenomena dan permasalahan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Indonesia.

Konsep perancangan pada interior kantor Ombudsman Republik Indonesia di ambil dari nilai nilai utama perusahaan dan tema yaitu “*Warm, Friendly and Trustworthy Service*”. Oleh karna itu Konsep yang digunakan adalah *Bright Design Ridgelights* dengan pengaplikasian pada elemen interior dan penataan ruang dan pemilihan segi material dan warna pada interior dengan maksud dapat memenuhi tema, konsep dan dapat menjawab permasalahan yang ada dengan tujuan dapat menciptakan suasana di dalam kantor dibuat hangat, bersih transparan, nyaman dengan tujuan dapat membuat Pengunjung dan Staf Ombudsman Republik Indonesia merasakan bersemangat dan merasakan nyaman ketika berada di kantor Ombudsman Republik Indonesia.

e. Output Perancangan

Hasil yang ingin diciptakan pada perancangan Kantor Ombudsman Republik Indonesia adalah diharapkan dapat terciptanya membuat tamu dan pengunjung Kantor Ombudsman Republik Indonesia merasa rilex dan nyaman.

Mind Mapping



Gambar Mind Mapping

Sumber : Data Pribadi

1.7 Kerangka Berpikir



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berpikir

Sumber : Data Pribadi

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, ruang lingkup & batasan masalah, tujuan & manfaat, metode pengumpulan data, kerangka berpikir, dan susunan penulisan.

BAB II KAJIAN LITERATUR DAN DATA PERANCANGAN

Menjelaskan dasar pemikiran dari teori-teori atau literatur yang relevan untuk digunakan sebagai pijakan dalam merancang dan menguraikan data & analisa proyek hingga analisa konsep perancangan interior.

BAB III KONSEP PERANCANGAN DESAIN INTERIOR

Menguraikan konsep perancangan, organisasi ruang dan layout furniture, konsep visual, serta persyaratan umum ruang.

BAB IV KONSEP PERANCANGAN VISUAL DENAH KHUSUS

Menguraikan pemilihan denah khusus, konsep tata ruang, persyaratan teknis ruang, dan penyelesaian elemen interior

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir dari laporan, dimana menghasilkan kesimpulan akhir dari penelitian, serta saran pada waktu sidang.